

Warok Pendekar Penghenti *Money Politics*: Peran Jejaring Warok dalam Kontestasi Politik di Tingkat Lokal (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo)

Rivaldi Mahardika¹

Diserahkan: 16 September 2021 | Diterima: 7 Desember 2021 | Diterbitkan: 30 Desember 2021

Abstrak

Penelitian ini mendiskusikan tentang bagaimana keterlibatan local strongman dalam kontestasi politik electoral di tingkat lokal. Secara khusus, riset ini berusaha memahami tentang fenomena warok di Kabupaten Ponorogo. Riset ini berupaya mengidentifikasi keterlibatan jejaring warok dalam pilkada, terutama dalam penghentian money politic yang dilakukan oleh kandidat yang lain. Strategi pemenangan ini merupakan suatu strategi baru yang dilakukan oleh tim pemenangan kepala daerah. Dalam menganalisis fenomena tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan yang diperoleh dari observasi secara langsung dari fenomena di Kabupaten Ponorogo, in-depth interview dengan tim pemenangan kandidat, anggota partai, dan tokoh masyarakat. Temuan dan analisis menunjukkan bahwa fenomena warok memiliki peran cukup penting dalam kontestasi politik electoral di tingkat lokal, dibuktikan dengan bergabungnya tim pemenangan kepala

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

daerah di Kabupaten Ponorogo dan strategi untuk menghentikan money politic yang dilakukan oleh lawan politik.

Kata kunci: *Warok; Local Strongman; Demokrasi; Money Politic; Politik Lokal*

Abstract

This Research discusses about the involvement of local strongman in electoral political contestation at regency. The topic tries to know how the warok phenomenon in Ponorogo Regency and to identify the involvement of warok networks in the regional general election, especially in stopping money politics by other candidates. This strategy is a new winning strategy by the regional head winning team. In analyzing this phenomenon, the researcher used a qualitative descriptive research method with collection techniques obtained from direct observation of phenomena in Ponorogo Regency, in-depth interviews with candidate winning teams, party members, and community leaders. The findings and analysis show that the warok phenomenon has an important role in election contestation at the local level, as evidenced by the joining of the regional head winning team in Ponorogo Regency and the strategy to stop money politics carried out by political opponents.

Keywords: *Warok; Local Strongman; Democracy; Money Politic; Local Politics*

PENDAHULUAN

Sejak terciptanya rezim reformasi, secara formal Indonesia kini telah diakui sebagai negara demokrasi. Proses demokratisasi di Indonesia terus berlangsung hingga merambah ke ranah lokal melalui desentralisasi. Pada kontestasi politik elektoral di tingkat lokal, orang kuat lokal memiliki peran yang sangat penting bagi kesuksesan demokrasi di daerah (Nordholt, 2007). Orang kuat lokal secara konsep dapat didefinisikan sebagai pemimpin nonformal negara seperti tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan, dan lain-lain yang membangun organisasi sosialnya yang berbentuk jejaring dalam rangka menjalankan kontrol sosial atas masyarakat untuk menguasai keseluruhan populasi yang mendiami wilayah tertentu.²

Pemahaman mengenai orang kuat lokal menjadi perdebatan teori yang menarik antara Migdal dan Sidel dalam memahami fenomena orang kuat lokal yang ada pada masyarakat. Istilah *local strongman* diperkenalkan oleh Joe Migdal dalam kajiannya tentang fenomena orang-orang kuat lokal di negara-negara dunia ketiga (*post colonial*) pada dekade 1970-an. Sementara, istilah

2 Melvin P. Hutabarat, (2012), "Fenomena 'Orang Kuat' di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi", *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia.

local bossism dipromosikan oleh John T. Sidel, Doktor Ilmu Politik alumnus Cornell University tahun 1995 yang banyak melakukan studi tentang Asia Tenggara, khususnya untuk isu-isu politik lokal dalam lanskap perbandingan politik internasional. Istilah ini digunakan Sidel sebagai “alternasi” dari konsep *local strongman* yang diperkenalkan Migdal.

Secara sekilas, kedua istilah ini jelas berbeda. Tetapi sebagai problematika akademik, keduanya memiliki beberapa kesamaan di samping perbedaan-perbedaan. Kesamaannya terletak pada gejala, bahwa keduanya adalah elemen masyarakat lokal yang memiliki kemampuan memengaruhi secara determinatif—bahkan, sampai batas tertentu—mengontrol kekuasaan dan sumberdaya ekonomi di tingkat lokal untuk kepentingan dan ambisi politik-ekonomi mereka. Kesamaan lainnya adalah bahwa kehadiran keduanya dalam lanskap kepolitikan lokal berpotensi menghambat pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi. Baik kajian Migdal maupun Sidel, keduanya berangkat dari setting sosio-politik yang sama, yakni fenomena kehadiran oligarkis, personalisme, dan klientilisme.

Migdal mengungkapkan tiga poin argumentasi tentang *local strongman* untuk menjabarkan tentang orang kuat lokal. **Pertama**, *local strongman* tumbuh

subur dalam masyarakat yang mirip dengan jaringan. Berkat struktur yang mirip jaringan inilah, para orang kuat lokal mendapatkan pengaruh signifikan yang jauh melebihi pengaruh para pemimpin dan para birokrat lokal formal. **Kedua**, orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai strategi bertahan hidup. Logika bertahan hidup, memberikan kesempatan bagi *local strongman* bukan saja bagi membangun legitimasinya di mata rakyat yang mengharapkan ibanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi juga memperluas kekuasaannya. Personalisme orang kuat lokal menempatkan mereka sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi kliennya yang (serba) kekurangan—di daerah kekuasaan mereka. **Ketiga**, *local strongman* secara langsung atau pun tidak langsung telah berhasil membatasi kapasitas lembaga dan aparatur negara sehingga menyebabkan pemerintah lemah.³

Sidel melihat bahwa kehadiran *local bossism* merupakan produk dari suatu konspirasi dan kolusi aparatur negara dengan orang-orang kuat lokal. Dengan konspirasi kuasa dan “wibawa sosial” melalui jaringan

3 Joel S. Migdal, (2001), *State in Society: Studying How States And Societies Transform And Constitute*.

masyarakat yang dikendalikan itulah para *bosses* hadir dan terus tumbuh sebagai kekuatan politik lokal. Para bos lokal yang memperoleh kekuasaan dan kekayaan bukanlah dari kepemilikan tanah pribadi seperti warisan leluhurnya, melainkan dari sumber-sumber yang dimiliki negara dan perdagangan. Dan banyak di antara mereka adalah golongan politisi dan elit-elit tuan tanah yang mengumpulkan pundi-pundi kekayaan termasuk kepemilikan tanah yang luas, justru didapatkannya setelah mereka memasuki atau menduduki jabatan resmi negara (seperti, menjadi anggota parlemen atau jabatan-jabatan eksekutif lokal), dan bukan sebelumnya.⁴

Konsep *Bossism* bagi Sidel merujuk pada peran elit lokal sebagai *broker-broker* politik predator (pemangsa) yang memiliki kontrol monopolistik terhadap kekuatan koersif dan sumber daya ekonomi dalam wilayah teritorial mereka (*predatory power brokers who achieve monopolistic control over both coercive and economic resources within give territorial jurisdictions or bailiwicks*). Bosisme beroperasi dalam bayangan rezim daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, bos-bos partai, pengusaha, militer, dan preman. Orang-orang kuat ini lahir justru karena kekuatan dari negara

4 John T. Sidel, (1999), *Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines*, Stanford: Stanford University Press.

dan karena kemampuannya untuk memanfaatkan negara. Sidel juga menafikan pendapat bahwa orang kuat ini lahir sebagai refleksi dari kekuatan masyarakat dan ketahanan elit tradisional atau oligarki regional. Sebaliknya, Sidel justru melihat watak negara yang kuatlah yang kemudian dikendalikan oleh jaringan para bos. Para bos inilah yang memanipulasi negara sehingga para bos memiliki kekuatan melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur hubungan-hubungan sosial, dan menggali sumber-sumber daya alam dan ekonomi.

Di sisi lain, orang kuat lokal (*local strongman*) memiliki pengaruh dalam setiap pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan presiden dan wakilnya maupun pemilihan wakil rakyat di tingkat pusat atau pun daerah. Peran orang kuat lokal dapat memberikan pengaruh signifikan dalam kemenangan kandidat pemilu, khususnya pemilihan kepala daerah. Peran aktor dalam memberi dukungan dalam bentuk dan proporsi yang berbeda tergantung tingkat kedekatan, kepercayaan, keahlian, dan kapasitas aktor yang kemudian pada tugas dan fungsi masing-masing aktor yang bertujuan untuk memenangkan pasangan kandidat tertentu

yang akan berlaga dalam pemilu.⁵ Terlebih apabila *local strongman* sendiri yang akan menjadi bagian dalam sebuah proses pemilihan umum bersaing untuk memperoleh kedudukan sebagai seorang pemimpin dalam suatu daerah, mereka akan berkompetisi untuk memperoleh dukungan atau suara terbanyak dari rakyat sehingga dalam perebutan ini, para aktor lokal atau elit politik tersebut menggunakan berbagai macam cara atau strategi sesuai dengan kekuatan dan pengaruhnya masing-masing terhadap masyarakat.⁶

Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo, terdapat dua kandidat yang bersaing mengikuti kontestasi demokrasi tersebut. Kandidat yang bersaing pada tahun 2020, yakni petahana Bupati Ipong Muchlissoni dengan pasangan Bambang Tri Wahono dan kandidat penantang Sugiri Sancoko dengan pasangan Lisdyarita. Hasil pada tahun 2020, kandidat penantang (Sugiri Sancoko) berhasil menggulingkan tahta dan merebut posisi Bupati Ponorogo untuk tahun 2021–2024 dengan perolehan

5 Hutabarat, Melvin P. (2012), “Fenomena ‘Orang Kuat di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi”, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia.

6 Joel S. Migdal, *State in Society: Studying How States And Societies Transform And Constitute One Another*, (Cambridge, UK: The Press Syndicate of The University of Cambridge), hlm. 59.

suara 352.047 suara (61,7%).⁷ Pada tahun 2020 pun, kandidat penantang (Sugiri Sancoko) berhasil membaca celah dan memberikan tawaran “Perubahan” untuk Kabupaten Ponorogo. Kekecewaan masyarakat ditambah strategi yang cukup matang diracik dan dieksekusi dengan baik oleh Sugiri Sancoko, semangat perubahan bisa langsung mengambil hati masyarakat dengan slogan “Ponorogo Hebat”. Motor penggerak politik dirakit dari *local strongman* dengan cukup bagus sehingga bisa memobilisasi masyarakat untuk memantabkan pilihannya pada Sugiri Sancoko.

Motor penggerak politik adalah bentuk relasi *patron-client* antara elit dengan tim pemenangan, fungsi motor penggerak politik ini yaitu menggerakkan seluruh modal bahkan menjalankan strategi pemenangan politik.⁸ Dalam kontestasi daerah, motor penggerak politik ini bisa terdiri dari anggota parpol, tokoh masyarakat, *underground* masyarakat, bahkan hingga warok. Warok di Kabupaten Ponorogo ini merupakan sosok *local strongman endemic* yang penyebutan sosok “warok” hanya ditemukan di Ponorogo. Melihat jejak sejarahnya, Ponorogo memiliki suatu kebudayaan yang

7 Charoline Pebrianti-detikNews, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5296450/rekapitulasi-pilkada-ponorogo-menangkan-sugiri-lisdyarita>, diakses pada 16 Mei 2020.

8 James C. Scott, “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia” dalam *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1. March, 1972.

menarik, dalam perkembangan sejarahnya terdapat peran warok dalam kontestasi Politik. Dalam kasus pilkada serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo, ada suatu fenomena menarik yakni ikut sertanya warok-warok dalam kontestasi politik sebagai motor penggerak politik. Jejaring warok cukup berperan aktif sebagai motor penggerak politik dan sebagai senjata politik untuk memberikan *pressure* kepada lawan politik.

Dalam kasus pada kontestasi Ponorogo, terdapat peran *local strongman* dilihat dengan partisipasi kelompok jejaring warok yang ikut berpartisipasi aktif dalam proses pilkada. Para jejaring warok ini yang biasa disebut “*Alap-alap Samber Nyowo*” serta “*Walet Ireng*” ini bergerak secara aktif dan masif untuk memobilisasi masyarakat serta menjalankan strategi politik dari pasangan calon Sugiri-Lisdyarita, sebagai motor penggerak politik yang aktif dalam menahan dan menangkal *money politic* dari pasangan calon lawan. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi fenomena *local strongman* warok di Kabupaten Ponorogo dengan dianalisis lebih lanjut, bagaimana peran *local strongman* warok dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah pilkada serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo?

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian Okamoto Masaaki dengan judul “Jawara in Power, 1999–2007” menganalisis hubungan yang berfluktuasi antara pemerintah pusat dan oligarki kekerasan lokal, dengan fokus di Banten, Indonesia.⁹ Di wilayah Banten lah oligarki lokal yang kejam paling berhasil mempertahankan dirinya secara ekonomi dan secara politis, setidaknya sampai sekarang. Ada alasan khusus area untuk keberhasilan ini. **Pertama** dari semua, wilayah Banten terletak di sekitar ibukota, Jakarta, dan karenanya, keamanan cukup penting dan penyedia keamanan swasta dapat berkembang dalam kolaborasi dengan polisi dan militer.

Kedua, jago dan jawara di wilayah Banten telah menggunakan kekuatan koersif untuk mendapatkan keuntungan pengaruh sosial dan untuk mengamankan kekuatan politik lokal selama waktu yang ditandai oleh gangguan. **Ketiga**, wilayah Banten tidak terlalu jauh dengan Jakarta, akan tetapi merupakan daerah yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Karena itu, tidak menarik bagi para intelektual yang kompeten dan pengusaha, yang bisa memilih untuk tinggal di tempat lain.

9 Abdul Hamid & Masaki Okamoto, (2008), *Jawara in Power 1999–2007*, Indonesia, 86, October: 109–138.

Pada penelitian lain, yakni penelitian oleh Abdul Hamid dengan judul “Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru” Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Jawara untuk memenangkan pemilihan Gubernur Banten 2001. **Pertama**, mereka memenangkan pertarungan di internal Golkar mengenai posisi apa yang akan diambil dan siapa yang akan dimajukan. Jawara berhasil memajukan Ratu Atut Chosiyah sebagai calon Wakil Gubernur dan menyingkirkan Aly Yahya yang telah mengambil formulir sebagai calon Gubernur dari Partai Golkar.¹⁰

Kedua, Jawara berhasil mengcaukan koalisi PPP dengan PDIP. Caranya, Golkar menggandeng PPP sebagai mitra koalisi utama, dengan pendekatan langsung Chasan Sohib—tokoh Jawara, tokoh Partai Golkar Banten, Ayah Atut Chosiyah—ke Djoko Munandar, Ketua DPD PPP Banten. Dengan mesin politik utama Golkar dan Jawara, para kader yang bergabung di tim sukses berbagai fraksi memberikan suara ke pasangan Djoko-Atut. **Ketiga**, Jawara melakukan intimidasi dengan mengerahkan kekuatan massa atas nama tenaga pengamanan, bahkan di dalam ruang sidang Jawara

10 Abdul Hamid, (2010), “Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten”, *Politika*, Jurnal Ilmu Politik.

hadir, ini memberikan tekanan psikologis kepada anggota Dewan. Selain itu, aktivitas ancam-mengancam juga berjalan walaupun dihembuskan melalui desas-desus selama proses pemilihan. **Keempat**, Jawara melakukan politik uang, kuat indikasi mereka membeli suara anggota Dewan dengan harga ratusan juta rupiah, dengan ini posisi mereka semakin kuat.

Kelima, penguasaan opini. Jawara melakukan kontrol terhadap opini yang berkembang terutama di media massa lokal. Jawara dengan kepentingannya agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dilanjutkan, berhasil mengendalikan opini. Jawara memiliki dua strategi. Pertama, membeli kalangan media yang mendukung kepentingan Jawara. Kedua, menekan kalangan media yang dianggap tidak kooperatif dengan kekerasan.

Yang membedakan penelitian ini dengan dua penelitian di atas adalah *local strongman* yang diposisikan sebagai instrumen politik para elit politik di Kabupaten Ponorogo merupakan subjek yang dipolitisasi para pemangku kekuasaan untuk meraih kekuasaan elektoral di tingkat lokal. Yakni, dengan keberhasilan Bupati Sugiri Sancoko merangkul dan mengayomi masyarakat luas, terutama kelompok-kelompok jejaring warok. Kelompok jejaring warok “*Alap-alap Samber*

Nyowo” dan kelompok “*Walet Ireng*” yang pada sejarahnya memiliki riwayat sering berkonflik bisa berkolaborasi bersama dirangkul oleh kandidat Bupati Sugiri Sancoko, mereka berhasil didamaikan dan diajak berkolaborasi bersama membangun visi misi untuk Ponorogo yang lebih baik. Kedua kelompok ini juga menjalankan strategi penghentian *money politic* untuk menekan serangan *money politic* yang dilancarkan oleh pihak lawan. Proses manajemen jejaring warok ini menempatkan warok sebagai instrumen politik yang berhasil membantu Sugiri Sancoko memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih karena peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang keikutsertaan warok pendekar politik sebagai instrumen elektoral di tingkat lokal di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020. Oleh sebab itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, *desk-study*, serta

wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap pihak-pihak terkait di situs penelitian.

Peneliti mendapatkan data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari observasi yang dilakukan mulai dari 15 Maret 2020 hingga 15 Maret 2021 di lokasi terkait, yakni di Kabupaten Ponorogo. Dengan teknik observasi, diharapkan peneliti akan mendapatkan gambaran secara langsung dari fenomena keikutsertaan warok pendekar politik selama kontestasi politik Pilkada 2020 di Kabupaten Ponorogo.

Peneliti melakukan *in-depth interview* dengan tim pemenangan kandidat yang memiliki kapasitas dan peran yang besar di dalam tim pemenangan Bupati Sugiri Sancoko. Peneliti melakukan *in-depth interview* dengan pelaku sejarah yang bernama Mbah Tobroni, koordinator jejaring warok *Alap-alap Samber Nyowo* yang bernama Mas Purwanto dan *Walet Ireng* yang bernama Mas Ari, serta anggota Tim Konsep yang bernama Mas Wisnu HP dan Tim Kuasa Hukum yang bernama Pak Didik Haryanto. *In-depth interview* ini dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021 hingga 20 Juni 2021 di Kabupaten Ponorogo setelah suasana pilkada mulai dingin. Dengan teknik *in-depth interview* diharapkan akan mendapatkan jawaban yang tepat dan berguna untuk penelitian ini. Selain mengumpulkan

data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dengan metode *desk-study* guna mendapatkan dokumen dan informasi yang bisa dijadikan sebagai referensi penelitian.

KARAKTERISTIK MASYARAKAT PONOROGO

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur memiliki beberapa karakteristik yang berbeda di beberapa daerah, hal ini tidak terlepas dari persebaran kultural di masyarakat yang terbagi berdasarkan wilayahnya. Secara umum, persebaran kultural masyarakat Jawa Timur terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Mataraman di Jawa Timur bagian barat, Arek di Jawa Timur bagian tengah, dan Tapal Kuda di Jawa Timur bagian timur. Kabupaten Ponorogo masuk ke dalam wilayah Mataraman. Wilayah Mataraman merupakan wilayah yang secara sosio-kultural memiliki kedekatan dengan budaya Mataram. Hal ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu, yang mana daerah-daerah di Jawa Timur bagian barat merupakan bekas daerah *vorstenlanden* atau wilayah kekuasaan Kerajaan

Mataram.¹¹ Masyarakat di wilayah Mataraman dalam bertutur kata cenderung lebih halus seperti masyarakat di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bertolak belakang dengan citra masyarakat Jawa Timur yang terkenal kasar dan blak-blakan.

Dalam masyarakat Jawa, terdapat suatu sistem terdiri atas tiga sub-kebudayaan Jawa yang masing-masing merupakan struktur sosial yang berlainan. Struktur tersebut antara lain abangan, santri, dan priyayi. Masyarakat Ponorogo memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan wilayah Mataraman lainnya. Masyarakat di wilayah Mataraman yang identik dengan masyarakat abangan rupanya tidak bisa menjadi patokan kekuatan politik di Ponorogo.¹² Di Ponorogo, kekuatan antara kaum abangan dan kaum santri relatif berimbang. Pada umumnya, kaum abangan memiliki basis kekuatan massa di ranah kebudayaan, seperti komunitas Reyog yang masih cukup kuat di Ponorogo, sedangkan kaum santri memiliki basis massa Nahdliyin yang juga cukup banyak di Ponorogo. Selain itu, faktor keberadaan pondok 37

11 Hayu Adi Darmarastrri, "Pekerja Anak di Surakarta Masa Kolonial: dari Pekerja Keluarga menjadi Pekerja Upah", *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 2 (1): 356. doi:10.22146/sasdayajournal.31748. ISSN 2549-3884.

12 Clifford Geertz, (1981), *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.

pesantren yang berjumlah ratusan di Ponorogo turut memengaruhi kekuatan kaum santri.

Pasca reformasi, pola masyarakat abangan dan santri di Ponorogo sudah mulai kabur atau bahkan melebur. Banyak ditemui di masyarakat yang memiliki latar belakang sebagai masyarakat abangan namun merasa dekat atau bahkan merasa menjadi bagian dari santri juga. Hal ini juga berlaku sebaliknya, banyak masyarakat dari kelompok santri yang merasa dekat dengan kelompok abangan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kali pemilu di Ponorogo yang mana partai pemenang masih didominasi oleh partai beraliran agama, khususnya yang memiliki kedekatan dengan Nahdliyin dan partai-partai beraliran nasionalis. Di pilkada Ponorogo, calon-calon yang diusung oleh partai berideologikan agama saling mengalahkan dengan partai yang beraliran nasionalis. Hal ini membuktikan, bahwa di Kabupaten Ponorogo kehidupan politik masyarakatnya cenderung dinamis dan tidak fanatik pada satu kelompok saja. Namun di antara banyak ideologi, hanya golongan agama (NU) dan nasionalis yang cukup langgeng dan dominan di Ponorogo.

WAROK PENDEKAR POLITIK

Indonesia memiliki keragaman budaya dan kondisi sosial, masing-masing daerah memiliki karakteristik sosial yang berbeda. Dalam tatanan sosial terdapat kelompok-kelompok sosial dengan dinamikanya sendiri, salah satunya kelompok *local strongman* yang memiliki posisi yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Di Kabupaten Ponorogo, kelompok-kelompok atau individu yang memiliki posisi yang berbeda ini disebut “warok”. Secara umum, warok merupakan pendekar atau jagoan yang disegani di daerah Ponorogo dan sekitarnya, biasanya menjadi pimpinan perkumpulan reyog (Hartono, 1980).

Menurut sejarahnya, kondisi sosial masyarakat Ponorogo terutama warok banyak dituliskan dalam buku sejarah. Konsep warok pun tertantang untuk ditafsirkan ulang sesuai semangat zaman. Menurut Purwowijoyo (1985), dalam sejarah yang cukup populer di Ponorogo ada salah satu warok yang fenomenal, yakni Warok Suromenggolo, diperkirakan hidup pada permulaan Kerajaan Majapahit, mengawali kisah mistis. Warok itu memiliki kolor sakti yang bisa membunuh lawan. Pusakannya yang lain, Luyung Bang, bisa menghidupkan orang mati. Dikisahkan, putri Suromenggolo bernama Cempluk jatuh cinta pada Subroto, putra penguasa

Trenggalek. Tetapi, Suminten, putri Warok Surogentho, juga terpikat dengan pemuda yang sama. Kedua warok itu pun bertarung demi membela anaknya, dan Suromenggolo menang. Kisah kolor sakti Suromenggolo melahirkan legenda kedigdayaan warok yang menjadi kebanggaan masyarakat, warok dicitrakan sebagai kelompok kuat yang disegani.

“Mbiyen warok sing kondang iku anare Warok Suromenggolo, beliau iso ngayomi dan dadi tauladan marang liyan, gelem ngalah kanggo keapikan masyarakat, kabeh wong podo nyegani mergo sifat sing luhur iku.”¹³

(dahulu warok yang terkenal itu namanya Warok Suromenggolo, beliau bisa mengayomi dan menjadi suri tauladan bagi orang lain, mau mengalah untuk kebaikan masyarakat, semua orang segan pada sifat yang luhur itu)—diterjemahkan oleh peneliti.

Namun, kelebihan ini justru menghadapkan mereka pada ketegangan sosial-politik. Ketegangan bermula dari kelahiran reyog oleh Demang Ki Ageng Kuthu Suryongalam, perwakilan pemerintah Kerajaan Majapahit di Ponorogo pada masa kekuasaan Bhre Kertabumi yang bergelar Brawijaya V (1468–1478). Kuthu menilai, raja gagal memimpin rakyat dengan adil karena dipengaruhi oleh permaisuri. Kuthu

13 Wawancara dengan Mbah Tobron (Ahmad Tobroni) sebagai warok pada 2 April 2021.

menghimpun warok untuk dilatih sebagai prajurit. Tetapi, niat makar urung dilaksanakan dan para warok diajak memainkan seni reyog. Dalam barongan, raja dilukiskan sebagai kepala harimau, yang ditunggangi merak berbulu indah. Itulah sindiran halus bahwa raja telah disetir permaisuri. Warok Tobroni (2020) dari Cokromenggalan mengungkapkan Belanda berusaha memecah belah warok agar tidak memberontak. Politik *divide at impera* berhasil menciptakan permusuhan di kalangan warok dan itu berlangsung hingga menjelang kemerdekaan. Warok lekat dengan citra kekerasan. Islam yang masuk ke Ponorogo juga memanfaatkan warok dan reyog sebagai sarana dakwah, sebagaimana dilakukan Ki Ageng Merah dan Bethoro Kathong. Jargon-jargon warok ditafsirkan dalam perspektif agama. Kata warok sendiri dirujuk pada kosakata Arab, *wara'*, yang berarti orang yang saleh dan alim.

Persyaratan untuk menjadi warok selain harus memiliki ilmu sakti mandraguna juga harus memiliki sifat-sifat, antara lain sifat patriotik dalam membela dan mengayomi daerahnya, memiliki sifat berbudi luhur, berwatak jujur, memiliki rasa bertanggung jawab yang besar, rela berkorban untuk kepentingan daerahnya, dan memiliki etos kerja yang tinggi dan tanpa pamrih, serta harus bersikap adil dan tegas.

Sifat-sifat sebagaimana di atas merupakan ciri khas warga Ponorogo menurut Kurnianto (2013), yang sampai saat ini masih mendarah daging dan menjadi watak serta karakter yang sangat dibanggakan oleh hampir seluruh warga Ponorogo. Selain sifat tersebut, warok dari legenda yang terus berkembang di masyarakat Ponorogo umumnya memiliki fisik yang berpenampilan sangar dengan jenggot dan kumis brewok, pakaian serba hitam, baju potong gulon atau tanpa kerah, celana panjang hitam lebar yang disertai dengan kolor putih besar dan menggunakan kain bebet sebagai udeng atau tutup kepala dengan mendolan. Ciri khas dari para ksatria Manggala tersebut hingga kini masih tetap menjadi idola dari warga Ponorogo. Dengan demikian, ciri fisik para warok tersebut selain tetap menjadi idola, juga tetap dilestarikan sebagai ciri khas asli daerah dan kini dikenal dengan warokan atau meniru gaya para warok.

Menurut warok asal Sumoroto, Mbah Wo Kucing (2019), warok sebaiknya jangan terbawa arus zaman, melainkan kukuh memberikan *wewarah* (pengajaran) nila-nilai luhur pada masyarakat. Warok juga dituntut menguasai *ilmu kaweruh* (kebijaksanaan spiritual), *reh kamanungsan sejati* (meniti jalan kemanusiaan sejati), dan warok jadi sumber ketentraman batin. Warok-

warok tua merupakan simpul penting untuk menelusuri identitas budaya masyarakat Ponorogo. Kehadiran mereka mengukuhkan kearifan lokal nilai, estetika, dan ilmu pengetahuan masa lalu yang semakin terdesak kapitalisasi dan penyeragaman semua aspek kehidupan. Namun, warok-warok sepuh itu pada waktunya akan meninggal. Jika generasi berikutnya gagal menangkap dan melestarikan spirit warok, bisa jadi tradisi ini tinggal sejarah. Banyak orang Ponorogo yang memakai pakaian warok, tetapi semakin sulit menemukan warok.

Dimulai pada masa sebelum kemerdekaan, warok adalah seseorang yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi dikarenakan memiliki kesaktian fisik dan kesaktian mandraguna. Mereka memegang suatu wilayah karena dinilai memiliki nilai lebih atas kekuasaan dan kebijakan yang mereka ambil. Warok disegani karena mereka bisa mengayomi dan menjadi teladan bagi masyarakat lainnya. Warok Suromenggolo disegani oleh para warok dan warokan di wilayah Ponorogo. Warokan adalah orang yang sering melakukan tindakan kriminal dan suka merampas barang orang lain, saat ini kita bisa menyebut mereka begal atau maling, warokan ini melakukan banyak tindakan kekerasan pada masyarakat karena mereka memiliki kesaktian fisik dan mandraguna. Yang membedakan warok dengan warokan

adalah sifatnya, mulai dari emosi yang tidak stabil serta kedewasaan dalam mengambil keputusan. Pecahnya warok ini juga diakibatkan oleh Belanda dengan cara *divide at impera* untuk memecah belah warok.

WAROK MERUPAKAN INSTITUSI YANG DIPOLITISASI

Setelah masa kemerdekaan, pada masa Orde Baru lebih tepatnya pada bupati Ponorogo bernama Sumadi pada tahun 1974–1984, pemetaan jejaring kekuasaan mulai dibentuk, Bupati Sumadi mengumpulkan semua warokan yang berasal dari latar belakang kriminal. Mereka semua dikumpulkan menjadi satu, diberikan edukasi politik dan diberikan pekerjaan berupa jabatan pamong desa dan beberapa titik kepala keamanan pasar. Pada dasarnya, orang berkelakuan jelek jika dibimbing dengan baik akan menjadi baik. Pada saat itu, warok membuat suatu organisasi yakni warok insan yang taqwa Ilahi dengan ketua Kyai Mujab Tohir dan sembilan ketua lainnya. Mbah Tobroni adalah pelopor pembentuk jejaring kekerasan dengan arahan yang baik, mereka mulai menggiring pola pikir warok yang beringas jadi warok yang disegani di masyarakat. Memelihara para mantan narapidana untuk dijadikan kekuatan politik guna menunjang kebijakan yang bisa dikeluarkan dan

memberdayakan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat.

“Pas jamane Bupati Sumadi, aku diutus nglumpukne warokan sing podo metu seko bui, enek sing seko penjara Nusa Kambangan, enek sing seko penjara Suroboyo, lan liane. Kabeh kui tak klumpukne tak jak rembuk lan dibimbing. Kabeh wes ora usah nyolong, ora usah ngrampas, kabeh tak jatah tak wenehi gawean. Gawean e dadi pamong deso, enek sing dadi bayan, enek sing dadi kamituwo, yo enek sing dadi lurah.”¹⁴

(Pada waktu Bupati Sumadi, aku ditugaskan mengumpulkan warokan yang keluar dari penjara, ada yang dari Nusa Kambangan, ada yang dari penjara Surabaya, dan lainnya. Semua dikumpulkan diajak diskusi dan dibimbing. Semua tidak perlu mencuri, merampas, semua sudah dijatah kerjaan. Pekerjaannya menjadi pegawai desa, ada yang jadi bayan, kamituwo, dan ada yang jadi lurah)—diterjemahkan oleh peneliti.

Pada masa orde lama, kekuatan politik di Ponorogo didominasi oleh kelompok elit politik dengan basis kebudayaan dan keagamaan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan kesenian Reyog yang menjamur di Kabupaten Ponorogo dan mayoritas masyarakat Ponorogo yang identik dengan santri Nahdliyin. Pada tahun 1950–1959, pemanfaatan Reyog Ponorogo untuk kepentingan politik mulai tampak. Hampir semua

14 Wawancara dengan Mbah Tobron (Ahmad Tobroni) sebagai warok pada 2 April 2021.

partai menggandeng kelompok Reyog untuk meraih simpati dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya Barisan Reyog Ponorogo (BRP). Pendirian kelompok ini terjadi saat sedang panas-panasnya isu akan diterapkannya konsep Nasionalis-Agama Komunis (Nasakom) oleh Pemerintahan Soekarno. BRP sendiri pada masa itu cukup berhasil dalam menarik simpati dalam mengumpulkan masa. Jumlah anggota BRP bahkan mencapai 461 kelompok Reyog (Pramono, 2004).¹⁵

Seiring berjalannya waktu, terjalin kedekatan antara BRP dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dominasi PKI di dalam BRP cukup terasa. Hal ini memicu keluarnya beberapa kelompok Reyog yang sebelumnya adalah bagian dari BRP untuk membentuk kelompok sendiri. Kelompok Reyog simpatisan Partai Nasional Indonesia (PNI) membentuk Barisan Reyog Nasional (BREN) dan kelompok Reyog simpatisan Partai Nahdlatul Ulama (NU) membentuk Cabang Reyog Agama (CAKRA). Namun, dominasi PKI dalam BRP tetap tidak tergoyahkan karena simpati masa di Ponorogo yang cukup kuat ke PKI dan BRP. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara pada pemilu tahun

15 Pramono, (2004), *Budaya Reyog dan Komunikasi Politik dan Kultorisasi Seni Budaya Reyog dalam Praktek Politik di Ponorogo*, LPPM Unmuh Ponorogo.

1955 di Ponorogo. Partai Komunis Indonesia berhasil memperoleh suara tertinggi dengan perolehan suara sebanyak 137.816 suara.

Perolehan lima Besar Suara Partai pada Pemilu Tahun 1955 di Kabupaten Ponorogo; posisi pertama diraih oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan jumlah 137.816 suara; diposisi kedua adalah Partai Nahdlatul Ulama (NU) dengan 96.039 suara; kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 79.008 suara; Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) dengan 34.198 suara; dan Partai Buruh dengan perolehan 6.023 suara (sumber: Mukarromah, 2012).

Dari perolehan suara tersebut, dapat dilihat bahwa partai yang menggunakan Reyog sebagai alat untuk memperoleh simpati dan mengumpulkan massa di Ponorogo, seperti PKI dengan BRP-nya, NU dengan CAKRA-nya, dan PNI dengan BREN-nya, berhasil memperoleh suara terbanyak dan masuk ke dalam tiga besar perolehan suara tertinggi di pemilu tahun 1955 di Kabupaten Ponorogo. Pasca peristiwa G30S tahun 1965, kekuatan PKI di Ponorogo mulai melemah. Beberapa orang yang diduga terlibat dalam organisasi tersebut mengalami pembantaian besar-besaran. Hal ini juga dialami oleh kelompok Reyog yang berada di naungan BRP. BRP yang identik dengan aktivitas Lembaga

Kesenian Rakyat (LEKRA) milik PKI akhirnya ikut dibubarkan seiring dengan dibubarkannya PKI.

Pada akhir masa Orde Baru, konflik kepentingan antara organisasi warok ini pun memanas, ditambah juga mulai masuknya organisasi pencak silat ke Kabupaten Ponorogo. Kesaktian fisik pada saat ini tidak hanya dimiliki oleh warok-warok ini, tetapi diturunkan langsung kepada masyarakat dengan adanya latihan dan sekolah pencak silat ini. Pencak silat juga memengaruhi mental dan pola pikir masyarakat Ponorogo. Sudah bermunculan masyarakat yang mulai ingin memiliki kesaktian fisik dan mandraguna, banyak warok-warok baru dengan latar belakang pendekar pencak silat. Mereka adalah generasi baru Warok Pendekar sebagai penerus warok dan warokan di zaman dulu. Secara umum, warok merupakan pendekar atau jagoan yang disegani di daerah ponorogo dan sekitarnya, biasanya menjadi pimpinan perkumpulan reog. Ada pula warokan, orang yang sering melakukan tindakan kriminal dan suka merampas barang orang lain, saat ini kita bisa menyebut mereka begal atau maling, warokan ini melakukan banyak tindakan kekerasan pada masyarakat karena mereka memiliki kesaktian fisik dan mandraguna.

Pemetaan warok pun pada saat itu tidak ditentukan lagi oleh kesaktian saja, tetapi juga ditentukan oleh

organisasi Pencak Silat, dan konflik mulai ada antara Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo. Pertarungan identitas warok berasal dari pertarungan identitas latar belakang organisasi pencak silat mereka, semua bertujuan untuk mengamankan aset massa keanggotaan dan eksistensi organisasi. Menjelang reformasi, konflik mulai memuncak, pertarungan identitas organisasi ini terjadi hingga adanya beberapa kali insiden kekerasan. Mulai dari penyerangan hingga beberapa kali perampasan aset organisasi. Warok-warok baru mulai bermunculan untuk menunjukkan eksistensi siapa yang memegang wilayah hingga pemegangan aset ekonomi seperti pengamanan pasar. Pertarungan antarwarok beda organisasi ini sering terjadi hingga telah banyak upaya mengadakan resolusi konflik untuk meredakan panasnya pertarungan ini, tetapi semua konflik selesai dengan hal kesepakatan yang tidak jelas, mungkin dikarenakan ada salah satu pihak yang mengalah atau mungkin sudah mulai menemukan kedewasaan berfikir dan bertindak.

Pasca reformasi, para warok pendekar ini mulai bermunculan lagi tetapi mereka mulai bermunculan sebagai tokoh publik dan tokoh politik. Banyak yang mulai duduk dengan jabatan politik dengan dukungan organisasi masing-masing. Terdapat warok-warok

muda yang menjadi kader partai serta mengikuti anggota dewan perwakilan daerah, ada juga warok tua yang menjadi penasihat politik, yakni Mbah Bikan Gondowiyono sebagai penasihat partai Demokrat Ponorogo dan Mbah Ahmad Tobroni sebagai penasihat partai Golkar. Identitas organisasi pencak silat adalah sebuah motor penggerak politik di daerah masing-masing, politik identitas berlaku cukup efektif untuk mendapatkan jabatan. Dalam menjabat sebagai tokoh politik, warok berperan juga untuk mengamankan aset massa dan aset ekonomi mereka, banyak instruksi untuk tetap menjaga dan memperluas jangkauan mereka. Salah satunya pelebaran pemegang ketua keamanan pasar, mereka melakukan invasi kekuasaan dengan mengambil alih kekuasaan pasar lainnya. Selain menguasai aset ekonomi, mereka juga mulai ikut serta dalam pertarungan politik. Terjun langsung dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah bupati dan pemilihan anggota legislatif. Daerah pemilihan pada kontestasi politik dengan basis massa organisasi tertentu menjadi lumbung suara yang cukup dijaga dan dijadikan patokan mereka untuk mendapatkan jabatan.

Pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo, terdapat dua kandidat yang bersaing mengikuti kontestasi demokrasi tersebut. Kandidat yang bersaing

pada tahun 2020 ini pernah juga bertemu dan bertarung dalam kontestasi pilkada serentak 2015. Kandidat petahana Bupati Ipong Muchlissoni dengan pasangan Bambang Tri Wahono diusung oleh partai Nasdem, PKB, Demokrat, Gerindra, Golkar, dan PKS dengan jumlah kursi DPRD Ponorogo sebanyak 36 kursi. Kandidat penantang Sugiri Sancoko dengan pasangan Lisdyarita diusung oleh partai PDIP, PAN, PPP, dan Hanura dengan jumlah kursi DPRD Ponorogo sebanyak sembilan kursi. Pertarungan sengit Sugiri Sancoko-Ipong Muchlissoni terjadi pada dua kali pesta demokrasi dengan hasil yang berbeda, pertarungan pertama pada tahun 2015 kandidat yang berhasil dimenangkan oleh kandidat Ipong Muchlissoni dengan perolehan suara 219.958 suara (39,37%). Tahun 2020, kandidat penantang (Sugiri Sancoko) berhasil menggulingkan tahta dan merebut posisi Bupati Ponorogo untuk tahun 2021–2024 dengan perolehan suara 352.047 suara (61,7%).

Dalam kontestasi politik terakhir, yakni pertarungan antara calon bupati Ipong Muchlissoni dengan calon bupati Sugiri Sancoko, identitas organisasi sangat berpengaruh untuk mendongkrak pendapatan suara mereka. Masing-masing pasangan calon ini gencar melakukan serangan untuk mendapatkan suara dari organisasi pencak silat. Peneliti menyoroti strategi pemenangan calon bupati

Sugiri Sancoko dengan mengikutsertakan jejaring warok sebagai motor penggerak politiknya. Motor politik jejaring warok yang dibuat oleh tim calon bupati Sugiri ini diberi nama *Alap-alap Samber Nyowo* dan *Walet Ireng*, anggota jejaring ini berasal dari para warok dan warokan pendekar yang menguasai organisasi pencak silat dan menguasai aset pasar pada masanya. Mereka dibentuk untuk memobilisasi masyarakat hingga strategi penghentian *money politic* dari lawan politiknya, pergerakan yang cukup aktif dan bersinergi cukup baik bisa mengantarkan calon bupati Sugiri Sancoko memenangkan kontestasi politik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo.

PADEPOKAN PENCAK SILAT MENJADI TEMPAT KONSOLIDASI POLITIK

Pada sejarahnya, kesaktian fisik dan mandraguna yang dimiliki oleh pendekar pencak silat saat ini tidak jauh dari *Paguron Lingkar Wilis* dan *Paguron Lingkar Lawu*. Kedua Paguron ini merupakan tempat para warok Ponorogo sebelum abad 19 mencari ilmu kesaktian fisik dan kesaktian mandraguna. Lingkar Wilis dengan tokoh terkenalnya yakni Singobowo fokus ajaran kesaktian fisik dan Lingkar Lawu dengan tokoh terkenalnya Sunan Lawu berfokus pada ajaran spiritual

dan mandraguna menjadikan Warok Ponorogo sebagai tempat awal lahirnya Pencak Silat. Dalam pencak silat yang berkembang, terdapat dua organisasi besar yang berseteru dan berkonflik cukup lama. Dilihat dari perspektif sejarah, menurut Habibi (2010) sebenarnya kedua perguruan ini memiliki basis ajaran yang sama, yakni ajaran ke-SH-an yang berintikan pada olah raga dan olah batin untuk mencapai keluhuran budi guna meraih kesempurnaan hidup. Perguruan Pencak Silat dengan basis Ilmu SH pertama kali dicetuskan oleh Ki Ngabei Soerodiwiryo tahun 1903.

Dengan latar belakang yang demikian, hingga saat ini isu mendasar dalam konflik Winongo dan Terate adalah identitas asli SH. Masing-masing organisasi mengklaim sebagai pembawa nilai dan ajaran asli SH, menganggap dirinya yang paling baik dan benar. Informasi tentang konflik identitas asli SH ini akan membantu kita memahami mengapa hingga saat ini konsep *enemy* yang dibangun oleh kedua belah pihak adalah Terate vs Winongo. Selain isu identitas asli, faktor-faktor lain yang memperparah konflik antara Terate dan Winongo adalah perebutan wilayah dan anggota. Konon, ketika dua murid SH mendirikan, masing-masing: Terate dan Winongo, mereka membuat kesepakatan untuk melakukan pembagian wilayah

“kekuasaan”. Winongo akan membangun basis di wilayah perkotaan sedangkan Terate di wilayah pinggiran. Namun pada perkembangannya, ada beberapa wilayah, baik perkotaan maupun pinggiran yang menjadi wilayah irisan antara Terate dan Winongo, dan biasanya wilayah ini paling rentan terjadi konflik.

Keberadaan Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo merupakan hal menarik bagi para elite politik, khususnya dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Ponorogo. Keberadaan Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo ini tidak hanya dimanfaatkan dalam perhelatan politik, tetapi juga dalam menempatkan pengaruh kekuasaan melalui pemerintah daerah. Elit di wilayah keberadaan perguruan Silat Setia Hati Terate atau pun Setia Hati Winongo ini berkepentingan terhadap dukungan politik. Pengaruh kedua perguruan silat tersebut tidak hanya mampu untuk sekadar mempererat antar anggota kelompok, tetapi juga mampu mendongkrak massa dalam arena Pileg ataupun Pilkada.

Warok yang dulu berasal dari pencapaian kesaktian fisik dan mandraguna secara autodidak, mulai dari konflik antara organisasi pencak silat muncullah warok-warok baru pendekar dari pencak silat. Warok baru inilah yang saat ini menguasai daerah-daerah, mereka menjadi

local strongman baru di daerah masing-masing. Warok pendekar ini hasil dari momentum eksistensi organisasi pencak silat pada tahun 1998, setelah pecahnya konflik dan reformasi. Warok pendekar ini banyak yang mulai disegani karena kekuatan fisik dan kebijaksanaannya dan ada pula yang ditakuti karena bersifat “warokan” atau memiliki kuasa atas daerah atau aset pasar. Para warok pendekar ini mulai memasuki aset pasar sebagai kepala keamanan pasar dan membentuk jaringan antar pasar di suatu daerah.

Warok pendekar saat ini juga terjun langsung dalam proses kontestasi politik, baik itu menjadi petugas partai, simpatisan partai, dan kepala desa di wilayah masing-masing. Beberapa politisi dengan latar belakang organisasi SH Terate berhasil mendapatkan kursi untuk menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019–2024 sebanyak lima orang dan terdapat 12 Kepala Desa yang menjabat pada periode 2019–2024. Organisasi ini juga memiliki anggota yang berhasil menjadi Bupati Ponorogo pada tahun 2015–2020, yakni Ipong Muchlisoni, serta sang istri Sriwahyuni juga menjadi anggota SH Terate dan berhasil mendapatkan kursi di DPR RI pada tahun 2019–2024. Politisi dari latar belakang organisasi SH Winongo juga berhasil mendapatkan jabatan pada kursi Kepala Desa sebanyak

enam orang. Pada fenomena ini, kedua organisasi pencak silat memiliki anggota yang aktif menjadi tim pemenang kepala daerah dengan nama kelompok *Alap-alap Samber Nyowo* dengan latar belakang SH Terate dan *Walet Ireng* dengan latar belakang SH Winongo. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota organisasi pencak silat juga aktif berperan dalam proses kontestasi politik di Kabupaten Ponorogo.

BERSATUNYA DUA KEKUATAN BESAR

Berangkat dari keresahan yang sama, kekecewaan terhadap kepemimpinan kepala daerah menjadi dasar yang kuat untuk berkonsolidasi dan membuat kesepakatan untuk melakukan sebuah perubahan. Masa kepemimpinan Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni dinilai masyarakat secara luas gagal dan membuat catatan negatif di hati masyarakat. Kinerja periode Bupati Ipong menjabat dinilai cukup buruk dengan banyaknya desas-desus kasus korupsi, infrastruktur, dan dinilai kurang mengayomi masyarakat. Akhirnya, dengan keresahan tersebut masyarakat secara sepakat memiliki keinginan untuk mengganti pemimpin di Ponorogo pada saat pilkada 2020. Masyarakat secara luas sepakat untuk “Gawe Bupati” dan sosok kandidat Bupati Sugiri Sancoko adalah pilihannya. Sugiri

Sancoko mendapatkan legitimasi sebagai warok dari masyarakat untuk menjadi Bupati Ponorogo tahun 2020–2024. Bupati Sugiri Sancoko berhasil merangkul dan mengayomi masyarakat luas, terutama kelompok-kelompok jejaring warok, kelompok pencak silat merupakan kelompok warok pendekar yang cukup kuat yang digunakan sebagai motor penggerak politik pemenangan. Kelompok *Alap-alap Samber Nyowo* dan kelompok *Walet Ireng* yang pada sejarahnya memiliki riwayat sering berkonflik bisa berkolaborasi bersama dirangkul oleh kandidat Bupati Sugiri Sancoko, mereka berhasil didamaikan dan diajak berkolaborasi bersama membangun visi misi untuk Ponorogo yang lebih baik. Kelompok-kelompok masyarakat bersepakat untuk mengganti sosok *incumbent* dengan sosok yang dinilai lebih baik dengan membawa perubahan untuk Ponorogo yang lebih baik.

Terdapat dua kelompok dengan kekuatan besar menyatakan siap dan berkolaborasi bersama untuk membawa perubahan di Kabupaten Ponorogo, kelompok dengan kekuatan besar tersebut adalah kelompok *Alap-alap Samber Nyowo* dan kelompok *Walet Ireng*. Dengan latar belakang pencak silat dari dua perguruan pencak silat yang cukup besar, *Alap-alap Samber Nyowo* dengan latar belakang Perguruan SH Terate dan

Walet Ireng dari latar belakang SH Winongo. Meskipun dengan latar belakang yang berbeda dan pernah memiliki jejak sejarah konflik antar kedua organisasi yang cukup panjang, mereka bersepakat untuk berkolaborasi dengan dasar kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati sebelumnya dan mengharapkan perubahan Ponorogo yang lebih baik. Selain persamaan visi dan misi, sosok Calon Bupati Sugiri Sancoko adalah aktor kunci yang bisa merangkul semua lapisan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok pencak silat.

Sosok calon Bupati Sugiri Sancoko dapat merangkul kelompok *Alap-alap Samber Nyowo* dan kelompok *Walet Ireng* yang berseberangan latar belakang ini dengan cara konsolidasi dan mediasi penyamaan perspektif dan visi misi untuk Ponorogo yang lebih baik. Sosok Sugiri Sancoko dianggap sebagai Warok baru yang dipercaya dan dilegitimasi masyarakat sebagai sosok yang dapat mengayomi, memimpin, serta sosok yang dapat membawa perubahan Ponorogo yang lebih baik dan hebat sesuai *tagline* kampanye Sugiri yakni “Ponorogo Hebat”.

“Mas Giri itu sosok warok modern yang dipercaya dan dilegitimasi oleh masyarakat Ponorogo, dengan mengayomi dan merangkul kabeh kelompok-kelompok masyarakat terutama ngrangkul 2 organisasi pencak silat gedi neng Ponorogo.”¹⁶

Alap-alap Samber Nyowo merupakan kelompok jejaring warok yang memiliki latar belakang organisasi pencak silat SH Terate. Penamaan *Alap-alap* dipilih dan terinspirasi dari burung jenis alap-alap dengan makna kelompok yang memiliki sifat cepat, tanggap, kuat, dan memiliki sikap tangguh dalam menghadapi keadaan. Makna *Samber Nyowo* sendiri memiliki arti efektif, tepat sasaran dalam melakukan suatu tindakan dengan semangat perjuangan mematahkan lawan politik. *Alap-alap Samber Nyowo* merupakan kelompok masyarakat yang terbentuk akibat kondisi kekecewaan politik. Pembentukan kelompok ini yaitu empat bulan sebelum masa pendaftaran bakal calon bupati. Kelompok ini dipelopori oleh Mas Purwanto dan Mas Agus Bimo Aji yang memiliki keresahan yang cukup mendalam dan memiliki semangat perjuangan untuk melakukan suatu perubahan. Kedua orang ini memelopori kelompok dengan mengajak jejaring warok yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Terdapat sekitar 2500 anggota bahkan lebih yang tersebar di setiap

16 Wawancara Mas Wisnu HP sebagai tim pemenang bupati pada 12 Mei 2021.

desa di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo, masing-masing kecamatan memiliki koordinator kecamatan yang berfungsi sebagai simpul komunikasi dan simpul koordinasi gerak sistem kerja kelompok. Yang dijadikan sebagai simpul-simpul di kecamatan adalah sosok *local strongman* atau sosok warok dan biasa disebut sebagai *pentolan* daerah.

“Alap-alap niku anggotane mayoritas SH Terate mas, kelompok niki dibentuk dari rasa kecewa kepemimpinane Bupati Ipong mas, enek sekitar 2500 bahkan luwih anggota alap-alap sing kesebar neng setiap deso, iki kelompok relawan mas kangge perbaikan system demokrasi neng Ponorogo.”¹⁷

(Alap-alap itu anggotanya mayoritas SH Terate, kelompok yang terbentuk dari rasa kecewa Bupati Ipong, ada sekitar 2500 anggota alap-alap yang tersebar disetiap desa, ini kelompok relawan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Ponorogo)—diterjemahkan oleh peneliti.

Walet Ireng merupakan kelompok jejaring warok yang berasal dari latar belakang SH Winongo, mereka merupakan relawan yang memiliki loyalitas dan kekompakan dengan napas perjuangan. *Walet Ireng* dipilih para warok SH Winongo sebagai gerakan universal untuk menciptakan sebuah perubahan yang

17 Wawancara Mas Purwanto sebagai koordinator *Alap-alap* pada 4 Juni 2021.

lebih baik. Kelompok ini tumbuh dan berkembang sejak dulu, tetapi masa hidupnya hanya pada saat musim pemilihan kepala daerah. Nama *Walet Ireng* terinspirasi dari gambar walet berwarna hitam dari logo SH Winongo.

Filosofi burung Walet (burung yang bertubuh kecil itu), diminta atau tidak diminta, dipelihara atau tidak dipelihara, Tuhan telah menakdirkan dirinya terus berkreasi membuat sesuatu (sarang) yang terbaik dan bernilai tinggi bagi dirinya maupun bagi kehidupan manusia. Burung Walet mampu membuat sarang yang baik, tahan cuaca, aman serta berharga tinggi bagi manusia. Bahwa *Walet Ireng* adalah kelompok relawan yang memiliki dedikasi dan loyalitas serta membawa kebermanfaatn pada masyarakat. *Walet Ireng* pada pilkada Ponorogo modern ini dibentuk dan dipelopori oleh Mas Ari dan Mas Mustanto (Munto) sejak pemilihan bupati tahun 2014. *Walet Ireng* tetap setia dan memiliki loyalitas terhadap Calon Bupati Sugiri Sancoko mulai tahun 2014 sampai 2019, anggota *Walet Ireng* tersebar di 21 kecamatan dengan masing-masing kecamatan memiliki anggota sekitar 200 orang. Kelompok ini bergerak dengan dasar semangat perubahan untuk Ponorogo yang lebih baik dan lebih demokratis.

“Walet Ireng itu kelompok relawan dari SH Winongo mas. Kita itu gerakan universal untuk perubahan Ponorogo. Kita mengawal mas Giri itu sejak tahun 2014. Yang memelopori kelompok ini, aku sama Mas Munto, anggotane per kecamatan sekitar 200 orang mas.”¹⁸

Kelompok *Alap-alap Samber Nyowo* dan *Walet Ireng* merupakan salah satu motor penggerak politik Calon Bupati Sugiri Sancoko, motor penggerak politik yang berasal dari relawan dengan loyalitas tinggi. Kedua kelompok ini memiliki posisi yang sangat sentral dan strategis sebagai motor penggerak politik karena kedua kelompok ini memiliki basis massa yang cukup besar dan mengemban tugas utama pemenangan di lapangan atau masyarakat secara langsung.

Kelompok *Alap-alap Samber Nyowo* dan *Walet Ireng* memiliki tugas yang sama sebagai motor penggerak politik, dengan dua tugas utama, yaitu memobilisasi masyarakat dan menghentikan *money politic*. Tugasnya yang pertama adalah memobilisasi masyarakat terutama kelompok asal dari kedua kelompok ini yang memiliki massa yang cukup besar untuk memilih dan mendukung Calon Bupati Sugiri Sancoko. Proses mobilisasi dikoordinasi langsung secara sistematis melalui koordinator cabang ke koordinator kecamatan

¹⁸ Wawancara Mas Ari sebagai koordinator Walet Ireng pada 4 Juni 2021.

untuk dieksekusi di tingkat desa. Jaringan yang begitu kuat dan tersebar sangat luas menjadikan dua kelompok ini dapat melaksanakan proses mobilisasi yang cukup efektif dan efisien.

Tugas kedua kelompok ini adalah penghentian *money politic* yang dilakukan oleh lawan politik, yakni Calon Bupati Ipong Muchlisoni. Proses penghentian *money politic* merupakan strategi gagasan baru yang digunakan oleh tim pemenangan Bupati Sugiri Sancoko. Strategi seperti ini belum pernah ditemukan dan dilakukan oleh tim pemenangan bupati mana pun. Strategi baru dan dianggap sangat efisien dalam menangkal dan mematahkan strategi persebaran *money politic* kepada masyarakat. Strategi ini memiliki tujuan utama, yakni menciptakan kontestasi politik yang bersih untuk demokrasi yang lebih bermartabat. Strategi penghentian *money politic* ini tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, bahkan strategi ini dijalankan dengan prosedural hukum didampingi oleh kuasa hukum tim pemenangan Sugiri Sancoko. Tim kuasa hukum dipimpin oleh pak Didik Haryanto, SH dengan dibantu oleh lima anggota pengacara. Tim kuasa hukum ini dibentuk dan bekerja sejak pendaftaran calon Sugiri Sancoko, strategi penghentian *money politic* ini berhasil

mendapatkan kasus tangkap tangan *money politic* yang dilaporkan langsung kepada Bawaslu sebanyak 19 kasus.

“Kita di tim kuasa hukum mendampingi pelaporan kasus tangkap tangan sebanyak 19 kasus yang tersebar di beberapa kecamatan, proses pelaporan dilakukan sesuai prosedural dan tidak berlawanan dengan aturan hukum yang ada.”¹⁹

Sistem kerja strategi penghentian *money politic* memiliki proses dan tahapan dalam gerak kerjanya, tahapan-tahapan mulai dari pemetaan hingga eksekusi dilakukan secara sistematis. Tahapan pertama gerak dari strategi pencegahan *money politic* ini yakni proses pengumpulan informasi dari lawan politik, proses pengumpulan informasi dilakukan secara terbuka dan secara tertutup. Pengumpulan informasi lawan juga diintegrasikan dari dalam sistem dan menggunakan metode spionase. Tahapan selanjutnya, ketika data dan informasi didapatkan, yakni proses pengolahan informasi dan pemetaan aktor dan daerah politik. Pemetaan dilakukan guna membaca arah gerak dan aktor siapa saja yang terlibat di dalam tim lawan, pemetaan ini digunakan sebagai dasar bergerak dan melakukan tindakan mobilisasi dan pencegahan. Setelah didapatkan peta politik, maka proses gerak dan eksekusi lapangan akan

19 Wawancara Didik Haryanto sebagai ketua kuasa hukum pada 26 Mei 2021.

berjalan dengan mudah dan efisien. Ketika peta politik sudah terbentuk, tim yang berada di setiap kecamatan memiliki tugas mencermati dan mengawasi setiap gerak-gerik lawan politik, ketika ditemukan gerakan dari calon lawan maka informasi itu didistribusikan langsung ke atas dan dihentikan secara tegas. Proses pengawasan gerakan lawan dalam menyebarkan *money politic*, ketika terdapat penyebaran *money politic*, maka titik poin yang terdapat pelanggaran langsung dieksekusi dengan cara penghentian aktor dan langsung dilaporkan kepada Panwaslu dan Bawaslu didampingi oleh kuasa hukum. Pada saat di lapangan proses penghentian *money politic* ketika pelaku tidak dapat bekerja sama dengan baik dan melawan, maka tindakan tegas dan pemaksaan dilakukan untuk mempercepat proses pelaporan pelanggaran hukum kepada pelaksana pilkada.

Pada kasus ini, calon kandidat bupati Sugiri Sancoko juga membuktikan kepada masyarakat secara luas keseriusannya dalam memberantas *money politic*. Sugiri Sancoko sebagai calon yang cukup bersih dan tidak menjalankan praktik *money politic* dalam mengikuti kontestasi politik pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Ponorogo, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan *money politic* yang dilakukan

calon bupati Sugiri Sancoko di kantor Badan Pengawas Pemilu Ponorogo. Sosok yang berasal dari masyarakat kecil ini diyakini masyarakat Ponorogo sebagai sosok warok yang dapat memimpin dengan baik serta berdiri bersama seluruh lapisan masyarakat untuk “Ponorogo Hebat dan Bermartabat”.

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 terdapat dua kandidat yang bersaing mengikuti kontestasi demokrasi tersebut, yakni calon bupati *incumbent* Ipong Muchlisoni dan calon bupati penantang Sugiri Sancoko. Pada tahun 2020 pun, kandidat penantang (Sugiri Sancoko) memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah kabupaten Ponorogo dengan merangkul para *local strongman* yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo, *local strongman* pada fenomena di Kabupaten Ponorogo ini diposisikan sebagai instrumen politik para elit politik di Kabupaten Ponorogo. Motor penggerak politik yang berasal dari *local strongman*, yakni jejaring warok membuat tim pemenangan bupati Sugiri Sancoko dapat dengan mudah merebut kekuasaan, motor penggerak ini disebut dengan *Alap-alap Samber Nyowo* berlatar

belakang SH Terate dan *Walet Ireng* berlatar belakang SH Winongo. Basis massa yang cukup besar dan loyalitas terhadap identitas menjadikan kelompok ini sebagai motor penggerak politik yang cukup besar untuk memenangkan kontestasi pilkada.

Strategi kemenangan yang belum pernah dilakukan oleh tim kemenangan di tempat lain telah digagas dan dieksekusi cukup baik oleh kelompok *Alap-alap Samber Nyowo* dan kelompok *Walet Ireng*. Strategi penghentian *money politic* adalah gagasan baru dalam memberantas kejahatan politik untuk terciptanya pesta demokrasi yang lebih bersih dan bermartabat. Keberhasilan kedua kelompok ini adalah telah memenangkan Sugiri Sancoko pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Ponorogo dengan perolehan suara 352.047 suara (61,7%). Selain itu, kedua kelompok ini juga telah menghentikan dan melaporkan kepada Bawaslu Ponorogo sebanyak 19 kasus tangkap tangan *money politic* di beberapa tempat di Kabupaten Ponorogo.

Peneliti memilih menggunakan kerangka teori pemahaman tentang orang kuat lokal dari Joel Migdal dengan konsep *local strongman* dari pada menggunakan konsep *local bossism* dari John T. Sidel dengan pertimbangan variabel penelitian dan relevansi teori penelitian terhadap fenomena orang kuat lokal

yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pada fenomena warok sebagai *local strongman* di Kabupaten Ponorogo, peneliti dapat menyimpulkan pemahaman konsep teori mengenai *local strongman* yang relevan pada temuan fenomena penelitian ini. Sesuai pendapat Migdal tentang *local strongman* dengan dua karakteristik, *local strongman* tumbuh subur dalam masyarakat yang mirip dengan jaringan. Berkat struktur yang mirip jaringan inilah, para orang kuat lokal mendapatkan pengaruh signifikan yang jauh melebihi pengaruh para pemimpin dan para birokrat lokal formal. Seperti pada fenomena banyaknya jejaring warok yang memiliki latar belakang organisasi pencak silat dan tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Yang kedua bahwa *local strongman* melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai strategi bertahan hidup. Logika bertahan hidup memberikan kesempatan bagi *local strongman* bukan saja bagi membangun legitimasinya di mata rakyat yang mengharapkan ibanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, melainkan juga memperluas kekuasaannya. Personalisme orang kuat lokal menempatkan mereka sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi kliennya yang (serba) kekurangan di daerah kekuasaan mereka. Berdasar latar

belakang temuan fenomena ini, terdapat kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah Bupati Ponorogo masa periode 2015–2020 Ipong Muchlisoni. Jejaring warok menawarkan konsep “Gawe Bupati” dan sosok kandidat Bupati Sugiri Sancoko adalah pilihannya untuk harapan Ponorogo yang lebih baik.

Terdapat juga temuan lain mengenai pemahaman konsep teori *local strongman* dalam penelitian ini, bahwa *local strongman* membentuk kekuatannya dengan berbagai cara salah satunya adalah melalui kekerasan, intimidasi, dan bahkan sumbangan sosial. Pada temuan ini dapat kita lihat proses strategi penghentian *money politic* yang dilakukan oleh warok dilakukan dengan cara ketika pelaku tidak dapat bekerja sama dengan baik dan melawan, maka tindakan tegas dan pemaksaan dilakukan untuk mempercepat proses pelaporan pelanggaran hukum kepada pelaksana pilkada.

REFERENSI

- Abd. Halim. (2014). *Politik Lokal Pola Aktor & Alur Dramatikalnya: Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung*. Yogyakarta: LP2B.
- BPS. (2016). *Kabupaten Ponorogo dalam Angka 2016*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Charoline Pebrianti (2019). <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5296450/rekapitulasi-pilkada-ponorogo-menangkan-sugiri-lisdyarita>. *DetikNews*. diakses pada 16 Mei 2020.
- Darmarastri, Hayu Adi. (2017). "Pekerja Anak di Surakarta mas Kolonial: dari Pekerja Keluarga Menjadi Pekerja Upah." *SASDAYA: Gajah Mada Journal of Humanities*. ISSN 2549-3884.
- Geertz, Clifford. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Habibi, A. (2010). *Sejarah Pencak Silat Indonesia (Studi Historis Perkembangan Persaudaraan Setia Hati Terate Di Madiun Periode Tahun 1922-2000)*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

- Hamid, A. (2010). Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten. *Politika, Jurnal Ilmu Politik*.
- HAMID, Abdul & Okamoto MASA AKI. (2008). "Jawara in Power 1999-2007. *Indonesia*.86. October: 109-138.
- Hartono. (1980). Reyog Ponorogo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nordholt, H. Schulte & Klinken, Gery van. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: YOI & KITLV.
- Hutabarat, Melvin P. (2012). "Fenomena 'Orang Kuat' di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi." *Tesis*. Universitas Indonesia.
- James C. Scott. (1992). "Patron-Client Politics and Political Change in SoutheastAsia" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1. March.
- Joel S. Migdal. (2001). *State in Society: Studying How States And Societies Transform And Constitute One Another*. Cambridge, UK: The Press Syndicate of The University of Cambridge.
- Kacung Marijan. (2010). Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Jakarta: Kencana Predana Media Group.

- Kurnianto, R. (2013). "Sejarah dan Dinamika Seni Reyog Ponorogo," *Researchgate*.
- Masaaki, Okamoto dan Abdur Rozaki, (Ed). (2006). *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit IRE.
- Mukarromah, S. (2012). "Mobilisasi Massa Partai melalui Seni Pertunjukan Reyog Ponorogo." *Skripsi*. Universitas Airlangga: Fakultas Ilmu Budaya.
- Pramono. (2004). *Budaya Reyog dan Komunikasi Politik dan Kulturisasi Seni Budaya Reyog dalam Praktek Politik di Ponorogo*. LPPM Unmuh Ponorogo.
- Purwowijoyo. (1985). *Babad Ponorogo*. Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- Sidel, John T. (1999). *Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines*. Standford: Stanford University Press.